



## Susunan Pancasila Yang Bersifat Hirarkis dan Berbentuk Piramidal, Rumusan Hubungan Kesatuan Sila-Sila Pancasila Yang Saling Mengisi dan Mengkualifikasi, Dinamika dan Tantangan Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha<sup>1</sup>, Ashfiya Nur Atqiya<sup>2\*</sup>, Nanda Widyadinata<sup>3</sup>  
Sahara Yuliana<sup>4</sup>, Yunandia Yunandia<sup>5</sup>

<sup>1,3,4,5</sup> UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

[am.mustain.n@gmail.com](mailto:am.mustain.n@gmail.com)<sup>1</sup>, [ashfiy.anura@gmail.com](mailto:ashfiy.anura@gmail.com)<sup>2\*</sup>, [nwidyadinata@gmail.com](mailto:nwidyadinata@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[saharayuliana48@gmail.com](mailto:saharayuliana48@gmail.com)<sup>4</sup>, [yunandia52@gmail.com](mailto:yunandia52@gmail.com)<sup>5</sup>

Korespondensi Penulis: [am.mustain.n@gmail.com](mailto:am.mustain.n@gmail.com)\*

**Abstract.** Pancasila, as the basis of the Indonesian state, is a philosophical system that underlies national and state life with the principles of divinity, humanity, unity, democracy and social justice. The background to this research focuses on the urgency of Pancasila in globalization and also rapid social change, where new challenges require adaptation so that Pancasila remains relevant and effective. The aim of the research is to analyze the hierarchical and pyramidal structure of Pancasila, the formulation of the relationship between the precepts which complement and qualify each other, as well as the dynamics and challenges faced by Pancasila as a philosophical system. The research method uses library research to collect and analyze data from various relevant sources. The research results show that Pancasila, with its hierarchical structure that positions the precepts in a mutually supportive order, functions as a strong moral and ideological guide. The relationship between the Pancasila principles complement each other and also clarify each other's principles, forming a coherent and comprehensive system. However, challenges such as globalization, social inequality and political dynamics require adjustment and adaptation to maintain the relevance of Pancasila. This research emphasizes the importance of further study and development to ensure that Pancasila remains the basis of a strong and effective state in the modern era.

**Keywords:** Pancasila, Philosophical System, Hierarchical Structure.

**Abstrak.** Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, merupakan sistem filsafat yang mendasari kehidupan berbangsa serta juga bernegara dengan prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, serta juga keadilan sosial. Latar belakang penelitian ini berfokus pada urgensi Pancasila dalam globalisasi serta juga perubahan sosial yang cepat, di mana tantangan-tantangan baru memerlukan adaptasi agar Pancasila tetap relevan serta juga efektif. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis struktur hirarkis serta juga piramidal Pancasila, rumusan hubungan antara sila-sila yang saling mengisi serta juga mengkualifikasi, serta dinamika serta juga tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai sistem filsafat. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan serta juga menganalisis data dari berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila, dengan struktur hirarkis yang memposisikan sila-sila dalam urutan yang saling mendukung, berfungsi sebagai pedoman moral serta juga ideologis yang kuat. Hubungan antara sila-sila Pancasila saling mengisi serta juga memperjelas prinsip-prinsip satu sama lain, membentuk sistem yang koheren serta juga komprehensif. Namun, tantangan-tantangan seperti globalisasi, ketimpangan sosial, serta juga dinamika politik memerlukan penyesuaian serta juga adaptasi untuk menjaga relevansi Pancasila. Penelitian ini menekankan pentingnya kajian serta juga pengembangan lebih lanjut untuk memastikan Pancasila tetap sebagai dasar negara yang kokoh serta juga efektif di era modern.

**Kata Kunci:** Pancasila, Sistem Filsafat, Struktur Hirarkis.

## **1. PENDAHULUAN**

Struktur hirarkis serta juga dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan topik yang menarik serta juga kompleks dalam kajian sistem pemikiran serta juga ideologi. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa serta juga bernegara tetapi juga mengandung dimensi filsafat yang mendalam, mencerminkan nilai-nilai yang berlapis serta juga struktur yang bersifat hirarkis dalam penerapannya. Untuk memahami bagaimana Pancasila beroperasi sebagai sistem filsafat, penting untuk memeriksa bagaimana elemen-elemen dari struktur hirarkis ini saling berinteraksi serta bagaimana dinamika di dalamnya membentuk dasar pemikiran serta juga tindakan dalam sosial serta juga politik.

Struktur hirarkis Pancasila dapat dilihat dari cara nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya disusun. Pancasila terdiri dari lima sila yang disusun secara berurutan, yaitu: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, serta juga (5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Meskipun setiap sila memiliki bobot serta juga signifikansi tersendiri, struktur hirarkis ini menunjukkan bahwa sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi prinsip dasar yang mendasari serta juga memberikan orientasi bagi sila-sila berikutnya.

Dalam hirarkis ini, Ketuhanan Yang Maha Esa memegang posisi tertinggi, mencerminkan bahwa segala sesuatu dalam sistem filsafat Pancasila berawal dari keyakinan terhadap Tuhan sebagai sumber utama dari semua nilai serta juga norma. Nilai ini mengarahkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik dalam individu maupun kolektif, untuk berlandaskan pada keimanan serta juga ketaatan kepada Tuhan. Sila ini berfungsi sebagai fondasi moral serta juga spiritual yang mengarahkan penerapan nilai-nilai dari sila-sila berikutnya.

Sila-sila berikutnya dalam Pancasila membangun struktur nilai yang semakin konkret serta juga terfokus pada aspek sosial serta juga politik. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal, seperti hak asasi manusia, keadilan, serta juga kesetaraan. Prinsip ini merupakan manifestasi dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hubungan antarmanusia, memastikan bahwa setiap individu dihargai serta juga diperlakukan dengan adil serta juga bermartabat. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya kesatuan serta juga persatuan bangsa sebagai fondasi untuk menjaga stabilitas serta juga keharmonisan dalam masyarakat yang majemuk. Dalam struktur hirarkis Pancasila, sila ini berfungsi untuk memperkuat kohesi sosial serta juga mempertegas

pentingnya identitas bersama sebagai satu bangsa, meskipun di tengah-tengah perbedaan suku, agama, serta juga budaya. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, menyoroti prinsip demokrasi serta juga tata kelola yang baik. Sila ini menggambarkan dinamika proses politik serta juga pengambilan keputusan yang harus dilakukan dengan bijaksana serta juga berdasarkan musyawarah serta perwakilan. Dalam struktur ini, nilai-nilai demokrasi serta juga partisipasi politik yang sehat dijadikan sebagai alat untuk mewujudkan keadilan serta juga kesejahteraan sosial. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mencerminkan tujuan akhir dari sistem Pancasila, yaitu mewujudkan kesejahteraan serta juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sila ini menekankan perlunya redistribusi kekayaan serta juga sumber daya secara adil serta penciptaan kondisi sosial yang memungkinkan setiap warga negara untuk hidup sejahtera serta juga memiliki kesempatan yang sama.

Dalam hal dinamika, Pancasila sebagai sistem filsafat tidak hanya berfungsi sebagai struktur hirarkis yang statis, tetapi juga sebagai kerangka kerja yang dinamis. Dinamika ini terlihat dalam cara nilai-nilai Pancasila diterjemahkan serta juga diterapkan dalam praktik sosial serta juga politik. Misalnya, dalam perubahan sosial serta juga politik, prinsip-prinsip Pancasila sering kali diuji serta juga dipertimbangkan ulang untuk memastikan relevansi serta juga implementasinya. Proses ini melibatkan penyesuaian serta juga interpretasi nilai-nilai Pancasila untuk menghadapi tantangan zaman yang berubah.

Dinamika ini juga mencerminkan interaksi antara nilai-nilai Pancasila dengan perkembangan sosial serta juga politik. Misalnya, dalam menghadapi masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, serta juga konflik, nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat memberikan solusi yang adil serta juga bijaksana. Proses ini melibatkan refleksi kritis terhadap penerapan prinsip-prinsip Pancasila serta juga penyesuaian terhadap kebutuhan serta juga aspirasi masyarakat.

Dinamika Pancasila juga dapat dilihat dalam perdebatan serta juga interpretasi filosofis yang terjadi di kalangan pemikir serta juga pembuat kebijakan. Berbagai pandangan tentang makna serta juga penerapan nilai-nilai Pancasila sering kali muncul, mencerminkan keberagaman pendapat serta juga pendekatan dalam memahami serta juga mengimplementasikan sistem filsafat ini. Diskusi-diskusi ini berfungsi sebagai mekanisme untuk mengadaptasi serta juga memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi perubahan serta juga tantangan zaman.

Struktur hirarkis serta juga dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam sila-sila Pancasila berfungsi sebagai

panduan moral, sosial, serta juga politik dalam negara Indonesia. Struktur hirarkis memberikan kerangka dasar yang teratur serta juga sistematis, sementara dinamika menggambarkan fleksibilitas serta juga penyesuaian yang diperlukan untuk mempertahankan relevansi serta juga efektivitas sistem filsafat ini. Melalui interaksi antara struktur hirarkis serta juga dinamika ini, Pancasila berfungsi tidak hanya sebagai dasar negara tetapi juga sebagai sistem pemikiran yang hidup serta juga berkembang dalam menghadapi berbagai tantangan serta juga perubahan.

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Pancasila sebagai sistem filsafat mencakup berbagai tantangan dalam mempertahankan serta juga mengimplementasikan nilai-nilai dasarnya yang terus berkembang. Salah satu isu utama adalah pengaruh globalisasi yang membawa arus pemikiran serta juga nilai-nilai baru yang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Globalisasi memperkenalkan tantangan dalam menjaga integritas nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, serta juga keadilan sosial dalam masyarakat yang semakin terhubung serta juga terdiversifikasi. Selain itu, perubahan sosial serta juga ekonomi di Indonesia menimbulkan kesenjangan antara idealisme Pancasila serta juga realitas kehidupan sehari-hari, di mana ketimpangan ekonomi serta juga sosial masih menjadi masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan. Dalam ranah politik, implementasi nilai-nilai Pancasila sering kali terganggu oleh kepentingan politik yang bertentangan, sehingga mempengaruhi efektivitas prinsip-prinsip tersebut dalam pembuatan kebijakan serta juga pemerintahan.

Tujuan dari penelitian mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat adalah untuk mengeksplorasi serta juga memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dipertahankan serta juga diadaptasi dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi cara-cara yang efektif untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pemerintahan, pembuatan kebijakan, serta juga kehidupan sosial-ekonomi. Dengan memahami dinamika serta juga tantangan yang ada, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk memperkuat penerapan Pancasila dalam modern serta juga global. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Pancasila sebagai pedoman moral serta juga etika dalam menghadapi perubahan sosial serta juga politik.

Gap research mencakup kekurangan dalam pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diadaptasi dalam perubahan global serta juga sosial yang cepat. Banyak penelitian terdahulu mungkin tidak memadai dalam mengatasi cara-cara spesifik untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Pancasila dalam situasi kontemporer yang kompleks.

Selain itu, terdapat kebutuhan untuk menjelaskan lebih mendalam bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat berfungsi secara praktis dalam sistem pemerintahan serta juga kebijakan publik yang sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik serta juga ekonomi yang beragam. Penelitian yang ada saat ini mungkin belum cukup memadai dalam mengidentifikasi serta juga menjelaskan gap ini secara detail.

Urgensi penelitian tentang Pancasila sebagai sistem filsafat sangat tinggi, mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara serta juga pedoman moral bagi masyarakat Indonesia. Dalam menghadapi globalisasi serta juga perubahan sosial yang cepat, Pancasila perlu dipahami serta juga diterapkan dengan cara yang relevan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar negara tetap menjadi landasan yang kokoh dalam kehidupan berbangsa serta juga bernegara. Pancasila berfungsi sebagai alat untuk menjaga identitas nasional serta juga mempromosikan keadilan sosial, sehingga penelitian ini sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila dapat terus relevan serta juga efektif dalam mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Dengan memperkuat pemahaman serta juga penerapan Pancasila, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih adil, berintegritas, serta juga bersatu, sesuai dengan cita-cita dasar negara Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai metode utama untuk menggali serta juga menganalisis penerapan Pancasila sebagai sistem filsafat. Studi kepustakaan ini melibatkan penelaahan mendalam terhadap berbagai sumber tertulis, termasuk buku, jurnal akademik, artikel, serta juga dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang komprehensif mengenai teori, konsep, serta juga praktik terkait Pancasila, serta bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan serta juga diadaptasi dalam kontemporer. Dengan meneliti literatur yang ada, penelitian ini berusaha mengidentifikasi berbagai perspektif serta juga pandangan tentang Pancasila, serta mengkaji dinamika, tantangan, serta juga gap yang ada dalam implementasinya. Studi kepustakaan juga memberikan dasar yang kuat untuk membandingkan serta juga menganalisis informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas serta juga relevansi Pancasila sebagai sistem filsafat dalam menghadapi perubahan sosial serta juga globalisasi. Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori serta juga praktik Pancasila, serta menawarkan rekomendasi yang berbasis pada analisis literatur yang komprehensif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Susunan Pancasila: Struktur Hirarkis serta juga Piramidal**

Susunan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki struktur yang bersifat hirarkis serta juga berbentuk piramidal, menggambarkan hubungan serta juga hierarki yang saling mendukung antara sila-sila yang ada. Dalam setiap sila memiliki posisi serta juga fungsi yang spesifik, berkontribusi pada pembentukan sebuah sistem nilai yang kohesif serta juga terintegrasi, serta saling melengkapi untuk membimbing kehidupan berbangsa serta juga bernegara. Struktur ini dirancang untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan negara dapat diterapkan secara sistematis serta juga menyeluruh.

Pada puncak piramida, terdapat Sila Pertama, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sila ini berfungsi sebagai landasan moral serta juga spiritual bagi sila-sila lainnya. Dalam Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya sekedar mengakui adanya Tuhan, tetapi juga menegaskan bahwa kepercayaan serta juga hubungan dengan Tuhan adalah basis dari seluruh norma serta juga nilai dalam kehidupan berbangsa serta juga bernegara. Sila ini memberikan dasar filosofis serta juga spiritual yang membimbing prinsip-prinsip berikutnya. Dengan demikian, nilai-nilai ketuhanan berperan sebagai sumber utama yang membentuk serta juga mempengaruhi cara pandang serta tindakan masyarakat. Pengakuan akan adanya Tuhan yang Maha Esa menjadi pijakan utama yang menentukan arah serta juga tujuan dari keseluruhan prinsip Pancasila, memberikan makna yang mendalam bagi setiap aspek kehidupan bernegara serta juga bermasyarakat.

Di bawah puncak piramida, terdapat Sila Kedua, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.” Sila ini menjabarkan bagaimana nilai-nilai ketuhanan harus diwujudkan dalam hubungan antarindividu serta juga masyarakat. Dalam hal ini, kemanusiaan menjadi aspek yang sangat penting, mengedepankan hak asasi manusia, keadilan, serta juga martabat manusia. Prinsip ini menekankan perlunya penghargaan terhadap hak serta juga martabat setiap individu serta pentingnya tindakan yang adil serta juga manusiawi dalam interaksi sosial. Dengan adanya sila ini, nilai ketuhanan yang telah diakui dalam sila pertama diimplementasikan dalam bentuk tindakan konkret yang mencerminkan rasa kemanusiaan serta juga keadilan. Sila Kedua memfokuskan perhatian pada pentingnya menciptakan lingkungan sosial yang adil serta juga beradab, di mana setiap individu diperlakukan dengan hormat serta juga hak-haknya dihargai.

Sila Ketiga, yaitu “Persatuan Indonesia,” berfungsi untuk menerapkan nilai-nilai dari dua sila sebelumnya dalam persatuan serta juga kesatuan bangsa. Prinsip ini menekankan pentingnya solidaritas serta juga integrasi nasional di tengah keragaman etnis, budaya, serta

juga agama yang ada di Indonesia. Dengan adanya sila ini, nilai-nilai ketuhanan serta juga kemanusiaan diintegrasikan dalam sebuah kerangka yang lebih luas, yaitu persatuan bangsa. Sila Ketiga menuntut adanya upaya untuk memperkuat identitas nasional serta juga kohesi sosial, serta mengatasi potensi perpecahan yang dapat muncul akibat perbedaan. Prinsip ini menggarisbawahi perlunya rasa persatuan serta juga kesatuan yang melampaui perbedaan, memastikan bahwa berbagai kelompok dalam masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis serta juga saling menghargai.

Pada tingkat berikutnya, terdapat Sila Keempat, yaitu “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.” Sila ini berfungsi untuk menerapkan prinsip-prinsip dari sila-sila sebelumnya dalam struktur pemerintahan serta juga proses demokrasi. Prinsip ini menekankan pentingnya kebijaksanaan, musyawarah, serta juga perwakilan dalam pengambilan keputusan politik serta juga administratif. Dengan adanya sila ini, proses pemerintahan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh rakyat serta juga dilakukan secara bijaksana. Sila Keempat menggarisbawahi bahwa keputusan-keputusan penting harus diambil melalui musyawarah serta juga perwakilan, mencerminkan prinsip-prinsip kemanusiaan, persatuan, serta juga ketuhanan dalam setiap kebijakan yang dihasilkan. Prinsip ini memastikan bahwa pemerintahan berfungsi secara adil serta juga demokratis, dengan melibatkan semua elemen masyarakat dalam proses pembuatan keputusan.

Pada bagian dasar piramida terdapat Sila Kelima, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Sila ini berfungsi untuk menyatukan serta juga menerapkan nilai-nilai dari sila-sila sebelumnya dalam bentuk keadilan sosial serta juga kesejahteraan ekonomi. Prinsip ini menekankan pentingnya distribusi kekayaan serta juga peluang secara adil di seluruh masyarakat, memastikan bahwa seluruh rakyat mendapatkan akses yang setara terhadap sumber daya serta juga peluang. Sila Kelima berperan sebagai tujuan akhir dari implementasi Pancasila, memastikan bahwa semua nilai yang telah dibangun dari sila-sila sebelumnya terwujud dalam bentuk kebijakan serta juga tindakan yang memberikan manfaat serta juga kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya sila ini, prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, serta juga demokrasi diterapkan dalam sosial serta juga ekonomi, menciptakan masyarakat yang lebih adil serta juga sejahtera.

Struktur hirarkis serta juga piramidal Pancasila menunjukkan bahwa setiap sila saling mendukung serta juga menguatkan, membentuk sebuah sistem nilai yang koheren serta juga menyeluruh. Setiap sila memiliki fungsi serta juga posisi yang spesifik, tetapi juga saling terkait serta juga berkontribusi pada pembentukan sebuah sistem yang terintegrasi. Dengan

demikian, Pancasila tidak hanya sekadar rangkaian prinsip, tetapi merupakan sebuah sistem nilai yang holistik, di mana setiap aspek saling melengkapi serta juga memperkuat prinsip lainnya. Struktur ini memastikan bahwa penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa serta juga bernegara dapat berjalan dengan baik, menciptakan keseimbangan serta juga harmoni antara nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, serta juga keadilan sosial.

### **Rumusan Hubungan Kesatuan Sila-Sila Pancasila**

Hubungan antara sila-sila Pancasila dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang saling mengisi serta juga saling mengkualifikasi, di mana setiap sila tidak berdiri sendiri tetapi saling memperkuat serta juga memperjelas prinsip-prinsip dari sila lainnya. Struktur piramidal Pancasila menunjukkan bahwa setiap sila membangun serta juga melengkapi yang lainnya, membentuk sebuah kerangka nilai yang holistik serta juga terintegrasi untuk kehidupan berbangsa serta juga bernegara di Indonesia.

Pada puncak piramida, Sila Pertama, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa,” berfungsi sebagai dasar utama serta juga pilar moral bagi seluruh sila-sila Pancasila. Sila ini mengandung prinsip ketuhanan yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari segala nilai serta juga norma dalam kehidupan masyarakat. Tanpa adanya landasan ketuhanan ini, seluruh sistem nilai yang dibangun oleh Pancasila tidak akan memiliki arah serta juga makna yang jelas. Prinsip ketuhanan ini menggarisbawahi pentingnya kepercayaan serta juga hubungan dengan Tuhan dalam membentuk karakter serta juga etika masyarakat. Dengan adanya sila ini, Pancasila memperoleh dimensi spiritual yang memberikan arah serta juga tujuan bagi penerapan prinsip-prinsip lainnya. Prinsip ini juga menekankan bahwa seluruh norma serta juga aturan dalam kehidupan berbangsa haruslah berakar pada nilai-nilai ketuhanan, yang memberikan makna serta juga legitimasi bagi seluruh sistem nilai yang ada di bawahnya.

Sila Kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” berfungsi untuk mengembangkan serta juga menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam interaksi sosial serta juga hubungan antarindividu. Sila ini menegaskan bahwa penerapan nilai ketuhanan harus diwujudkan dalam bentuk tindakan yang mencerminkan keadilan, martabat manusia, serta juga perlakuan yang adil serta juga manusiawi terhadap sesama. Dengan demikian, Sila Kedua menambahkan dimensi kemanusiaan yang mengedepankan hak asasi manusia serta juga nilai-nilai keadilan dalam praktik sehari-hari. Prinsip ini berfungsi untuk memanusiakan nilai ketuhanan, menjadikannya prinsip-prinsip konkret yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosial. Dalam kemanusiaan menjadi jembatan yang menghubungkan nilai-nilai spiritual dengan tindakan

konkret dalam masyarakat, menjadikan nilai ketuhanan tidak hanya sebagai konsep abstrak tetapi sebagai pedoman praktis dalam interaksi antarindividu.

Sila Ketiga, “Persatuan Indonesia,” menjelaskan bahwa penerapan nilai-nilai ketuhanan serta juga kemanusiaan harus dilakukan dalam kerangka persatuan serta juga kesatuan bangsa. Prinsip ini menekankan pentingnya solidaritas serta juga integrasi nasional di tengah keragaman etnis, budaya, serta juga agama di Indonesia. Dalam hal ini, Persatuan Indonesia berfungsi untuk memastikan bahwa penerapan nilai-nilai ketuhanan serta juga kemanusiaan dapat terwujud dalam sebuah kerangka yang mengutamakan persatuan bangsa. Dengan adanya sila ini, integrasi serta juga solidaritas nasional menjadi kunci untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara efektif dalam masyarakat yang plural serta juga beragam. Prinsip ini menuntut adanya upaya untuk memperkuat identitas nasional serta juga kohesi sosial, serta mengatasi potensi perpecahan yang dapat muncul akibat perbedaan. Persatuan Indonesia menjadi jembatan yang menyatukan berbagai elemen dalam masyarakat, memastikan bahwa nilai-nilai ketuhanan serta juga kemanusiaan diterapkan dalam persatuan serta juga kesatuan bangsa.

Sila Keempat, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,” berfungsi untuk memformulasikan bagaimana prinsip-prinsip persatuan serta juga kemanusiaan diwujudkan dalam sistem pemerintahan serta juga proses demokrasi. Sila ini menekankan pentingnya kebijaksanaan, musyawarah, serta juga perwakilan dalam pengambilan keputusan politik serta juga administratif. Dalam hal ini, prinsip Kerakyatan berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi masyarakat diambil dengan mempertimbangkan kepentingan serta juga pandangan semua pihak secara adil. Sila Keempat menggarisbawahi bahwa proses pemerintahan harus dilakukan secara bijaksana serta juga melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pembuatan keputusan. Dengan adanya sila ini, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, serta juga persatuan diimplementasikan dalam bentuk sistem pemerintahan yang demokratis serta juga inklusif, menjadikan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya sebagai panduan moral tetapi juga sebagai dasar untuk pembuatan kebijakan publik.

Pada bagian dasar piramida, terdapat Sila Kelima, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Sila ini mencerminkan penerapan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, serta juga demokrasi dalam keadilan sosial serta juga kesejahteraan ekonomi. Prinsip ini berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan distribusi kekayaan serta juga peluang yang adil. Dengan adanya sila ini, seluruh nilai-nilai dari sila-sila sebelumnya diintegrasikan dalam bentuk kebijakan serta juga tindakan yang

bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang merata. Sila Kelima menjadi tujuan akhir dari implementasi Pancasila, memastikan bahwa nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, serta juga demokrasi terwujud dalam bentuk keadilan sosial serta juga kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyat. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya adanya kesetaraan serta juga pemerataan dalam distribusi kekayaan serta juga peluang, memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan manfaat yang adil dari hasil pembangunan serta juga sumber daya yang ada.

Kesatuan sila-sila Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya sekadar sekumpulan nilai, melainkan sebuah sistem yang saling terkait serta juga saling mendukung. Setiap sila memiliki peran serta juga fungsi spesifik, namun semuanya saling melengkapi serta juga memperkuat prinsip-prinsip lainnya. Struktur ini memastikan bahwa Pancasila berfungsi sebagai panduan yang komprehensif bagi kehidupan berbangsa serta juga bernegara, di mana setiap nilai berkontribusi pada pembentukan sistem yang koheren serta juga terintegrasi. Dengan demikian, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta juga dalam pembuatan kebijakan publik harus memperhatikan hubungan kesatuan antar sila-sila tersebut, memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar Pancasila dapat terwujud secara efektif serta juga menyeluruh.

### **Dinamika serta juga Tantangan Pancasila sebagai Sistem Filsafat**

Pancasila, sebagai ideologi serta juga dasar negara Indonesia, memegang peranan penting dalam membentuk serta juga mengarahkan kehidupan berbangsa serta juga bernegara. Sebagai sistem filsafat, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai rangkaian prinsip dasar, tetapi juga sebagai pedoman yang mendalam serta juga menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun, dalam perjalanannya, Pancasila menghadapi berbagai dinamika serta juga tantangan yang memerlukan perhatian serius untuk menjaga relevansi serta juga efektivitasnya sebagai dasar negara.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Pancasila adalah globalisasi. Globalisasi, dengan arus informasi, nilai, serta juga budaya yang melintasi batas-batas negara, sering kali membawa ide-ide baru yang dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Dalam arus informasi global menyebarkan nilai-nilai serta juga budaya yang mungkin tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, atau keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Misalnya, dalam era digital serta juga internet, nilai-nilai individualisme serta juga

materialisme yang kuat dari budaya Barat sering kali menghadapi resistensi di Indonesia, yang merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kolektivitas serta juga spiritualitas.

Globalisasi tidak hanya memperkenalkan nilai-nilai baru, tetapi juga mempengaruhi cara masyarakat Indonesia berinteraksi serta juga beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Ketika nilai-nilai asing ini mulai mempengaruhi cara pandang masyarakat, tantangan muncul dalam menjaga agar prinsip-prinsip Pancasila tetap relevan serta juga menjadi pedoman yang efektif di tengah arus perubahan yang terus berlangsung. Penyesuaian serta juga adaptasi diperlukan agar Pancasila dapat menghadapi tantangan global ini tanpa kehilangan esensinya. Ini memerlukan upaya aktif dalam mempromosikan serta juga menginternalisasi nilai-nilai Pancasila di tengah arus global yang mengalir deras.

Selain globalisasi, perubahan sosial serta juga ekonomi yang cepat di Indonesia juga menghadirkan tantangan signifikan bagi penerapan Pancasila. Ketimpangan ekonomi yang semakin melebar, masalah kemiskinan, serta juga ketidakadilan sosial merupakan isu-isu yang mengganggu pencapaian prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu pilar utama Pancasila. Dalam masyarakat yang sedang mengalami transisi ekonomi serta juga sosial yang pesat, sering kali terdapat jurang yang lebar antara idealisme Pancasila serta juga realitas kehidupan sehari-hari. Ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, serta juga kemiskinan yang terus-menerus menunjukkan bahwa implementasi prinsip keadilan sosial dalam Pancasila masih menghadapi banyak tantangan untuk diwujudkan secara merata.

Meskipun Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan yang mencolok dalam distribusi kekayaan serta juga akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan serta juga kesehatan. Ketimpangan ini tidak hanya menunjukkan kegagalan dalam menerapkan prinsip keadilan sosial tetapi juga menciptakan ketidakpuasan serta juga ketegangan sosial di kalangan masyarakat. Menangani ketimpangan ini memerlukan kebijakan serta juga tindakan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila diterjemahkan dalam bentuk kebijakan publik yang mampu mengurangi ketimpangan serta juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam ranah politik, penerapan nilai-nilai Pancasila sering kali terganggu oleh kepentingan politik serta juga ekonomi yang berbeda-beda. Persaingan politik serta juga kepentingan kelompok sering kali mempengaruhi efektivitas prinsip-prinsip Pancasila dalam kebijakan serta juga keputusan publik. Politik praktis sering kali mengakibatkan penafsiran serta juga implementasi Pancasila yang tidak konsisten. Kepentingan kelompok tertentu dapat

menyebabkan pengabaian terhadap nilai-nilai Pancasila demi kepentingan politik atau ekonomi jangka pendek. Hal ini menciptakan ketidakpastian serta juga ambiguitas dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, serta mengurangi efektivitasnya sebagai pedoman dasar dalam pengambilan keputusan politik serta juga pembuatan kebijakan.

Persaingan politik serta juga kepentingan kelompok sering kali menyebabkan pergeseran fokus dari nilai-nilai ideal Pancasila menuju pragmatisme politik. Dalam proses politik, sering kali terjadi kompromi yang mengabaikan nilai-nilai dasar Pancasila demi mencapai kesepakatan atau keuntungan politik tertentu. Misalnya, keputusan-keputusan politik yang diambil dengan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sosial atau hak asasi manusia dapat menciptakan ketidakadilan serta juga ketidakpuasan di masyarakat, serta mengganggu integritas prinsip-prinsip Pancasila itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa dalam proses politik, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi panduan yang konsisten serta juga berkelanjutan, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan politik sementara.

Tantangan lainnya yang dihadapi Pancasila sebagai sistem filsafat adalah bagaimana menginternalisasi serta juga menerapkan nilai-nilai tersebut dalam pendidikan serta juga kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan, penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila tidak hanya diajarkan sebagai teori, tetapi juga diterapkan dalam praktik. Pendidikan yang efektif harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum serta juga aktivitas sehari-hari, sehingga siswa serta juga generasi muda tidak hanya memahami nilai-nilai tersebut tetapi juga mengimplementasikannya dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, Pancasila akan menjadi bagian yang melekat dalam budaya serta juga perilaku masyarakat.

Selain itu, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari memerlukan kesadaran serta juga komitmen dari semua lapisan masyarakat. Masyarakat perlu memahami serta juga menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam tindakan mereka sehari-hari, baik dalam interaksi sosial, dalam pengambilan keputusan, maupun dalam menjalankan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Untuk itu, diperlukan upaya yang terus-menerus dalam promosi serta juga penegakan nilai-nilai Pancasila, baik melalui kampanye publik, program pendidikan, maupun kebijakan yang mendukung penerapan nilai-nilai tersebut.

Tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai sistem filsafat mencerminkan dinamika serta juga perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia serta dalam global. Pancasila perlu dipertahankan serta juga diadaptasi dengan bijaksana agar tetap dapat berfungsi sebagai dasar negara yang efektif serta juga relevan. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, penting untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Pancasila sambil melakukan

penyesuaian yang diperlukan untuk mengatasi perubahan serta juga dinamika yang ada. Dengan pendekatan yang tepat, Pancasila dapat terus berfungsi sebagai pedoman yang kokoh serta juga relevan dalam membimbing kehidupan berbangsa serta juga bernegara di Indonesia.

### **Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat**

Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat dalam Indonesia yang sedang berkembang serta juga menghadapi tantangan global saat ini tidak dapat diremehkan. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan landasan ideologis serta juga filosofis yang mengatur kehidupan berbangsa serta juga bernegara. Dalam situasi globalisasi serta juga perubahan sosial yang pesat, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral serta juga etika tetapi juga sebagai pemandu yang memberikan struktur serta juga arahan bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan serta juga perubahan yang muncul.

Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki lima sila yang masing-masing menyumbangkan prinsip-prinsip dasar yang saling terkait serta juga melengkapi satu sama lain. Sila Pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” menetapkan dasar moral serta juga spiritual yang mengarahkan seluruh sistem nilai Pancasila. Ini mencerminkan pengakuan terhadap kekuatan spiritual serta juga moral yang lebih tinggi, yang menjadi fondasi bagi norma serta juga nilai dalam kehidupan sosial serta juga politik. Dalam menghadapi globalisasi yang seringkali membawa nilai-nilai yang berbeda serta juga kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip ketuhanan, Pancasila berfungsi untuk menegakkan serta juga menguatkan keyakinan bahwa nilai-nilai spiritual serta juga moral harus tetap menjadi pusat dari pengambilan keputusan serta juga kebijakan .

Sila Kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam interaksi sosial. Ini menjadi penting dalam era globalisasi di mana isu-isu hak asasi manusia serta juga keadilan sosial sering kali menjadi pusat perhatian global. Pancasila menekankan bahwa setiap individu harus diperlakukan dengan adil serta juga manusiawi, serta juga bahwa nilai-nilai tersebut harus diintegrasikan dalam pembuatan kebijakan publik. Dengan demikian, Pancasila memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana prinsip-prinsip kemanusiaan harus diterapkan dalam sosial serta juga politik yang semakin kompleks.

Sila Ketiga, “Persatuan Indonesia,” memainkan peran penting dalam menjaga identitas nasional di tengah keragaman budaya serta juga etnis. Dalam era globalisasi, di mana interaksi antarbudaya semakin meningkat, Pancasila berfungsi untuk memperkuat rasa persatuan serta

juga kesatuan bangsa. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya integrasi serta juga solidaritas nasional untuk mengatasi perbedaan serta juga mempromosikan harmoni di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pancasila membantu dalam membangun serta juga memelihara rasa kebangsaan serta juga kesatuan yang kuat, yang sangat penting untuk menghadapi tantangan global serta juga lokal.

Sila Keempat, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,” menekankan pentingnya proses demokrasi serta juga kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan politik. Dalam politik global yang sering kali dipengaruhi oleh berbagai kepentingan serta juga tekanan internasional, prinsip ini memastikan bahwa kebijakan serta juga keputusan dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh masyarakat serta juga dilakukan melalui proses musyawarah yang adil. Ini menekankan perlunya integritas serta juga transparansi dalam pemerintahan, serta perlunya memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila tetap menjadi panduan dalam proses politik serta juga pengambilan keputusan.

Akhirnya, Sila Kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” mencerminkan komitmen terhadap distribusi kekayaan serta juga kesempatan yang adil. Dalam dunia yang semakin terkoneksi, ketimpangan ekonomi serta juga sosial menjadi isu yang mendunia. Pancasila memberikan pedoman untuk memastikan bahwa keadilan sosial serta juga kesejahteraan ekonomi diterapkan secara merata di seluruh masyarakat. Prinsip ini menuntut perhatian terhadap masalah-masalah ketidakadilan serta juga kemiskinan, serta juga mendorong tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial serta juga meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.

Dalam globalisasi, yang membawa arus informasi serta juga nilai-nilai baru yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai lokal, Pancasila memainkan peran penting dalam menjaga serta juga memperkuat identitas nasional Indonesia. Pancasila memberikan kerangka kerja yang memungkinkan Indonesia untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Ini membantu memastikan bahwa nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, serta juga keadilan sosial tetap relevan serta juga dapat diimplementasikan secara efektif dalam modern.

Pentingnya penelitian serta juga pengembangan lebih lanjut mengenai Pancasila tidak bisa diabaikan. Dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah, Pancasila perlu terus dikaji serta juga diadaptasi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut tetap relevan serta juga dapat berfungsi dengan baik. Penelitian yang mendalam tentang Pancasila dapat membantu mengidentifikasi area-area di mana prinsip-prinsip tersebut dapat diperkuat atau

disesuaikan, serta bagaimana mereka dapat diterapkan dalam sosial, politik, serta juga ekonomi yang berubah.

Kaji ulang Pancasila juga diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak hanya dipahami sebagai doktrin kuno tetapi sebagai pedoman hidup yang dinamis serta juga adaptif. Proses adaptasi ini tidak berarti mengubah prinsip-prinsip dasar Pancasila, tetapi lebih pada bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan serta juga diterapkan. Ini termasuk memperhatikan perubahan dalam struktur sosial, politik, serta juga ekonomi, serta bagaimana Pancasila dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan baru yang muncul.

Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada kemampuannya untuk memberikan pedoman yang stabil serta juga konsisten dalam menghadapi perubahan yang cepat serta juga tantangan global. Pancasila bukan hanya sekadar dokumen sejarah, tetapi sebuah sistem filsafat yang hidup serta juga relevan yang harus terus dijaga, dipahami, serta juga diterapkan secara efektif untuk memastikan bahwa Indonesia tetap dapat berkembang sebagai negara yang adil, harmonis, serta juga sejahtera. Dengan memahami serta juga menerapkan Pancasila secara menyeluruh, diharapkan masyarakat Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan zaman dengan lebih baik, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai dasar yang telah lama menjadi landasan negara.

#### **4. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat menunjukkan bahwa Pancasila, dengan struktur hirarkis piramidal serta juga hubungan antar sila yang saling mengisi, berfungsi sebagai landasan ideologis serta juga filosofis yang kokoh bagi Indonesia. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, perubahan sosial, serta juga dinamika politik, Pancasila tetap menjadi pedoman penting yang mengarahkan kehidupan berbangsa serta juga bernegara dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, serta juga keadilan sosial. Meskipun menghadapi tantangan seperti ketimpangan sosial, pengaruh politik, serta juga nilai-nilai asing yang bertentangan, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi serta juga tetap relevan di tengah perubahan zaman, memastikan bahwa nilai-nilai dasarnya terus berfungsi sebagai panduan yang efektif untuk membangun masyarakat yang adil, harmonis, serta juga sejahtera.

Susunan pancasila yang bersifat hirarkis dan berbentuk piramidal; rumusan hubungan kesatuan sila-sila pancasila yang saling mengisi dan mengkualifikasi; dinamika dan tantangan pancasila sebagai sistem filsafat; dan urgensi pancasila sebagai sistem filsafat

## **BIBLIOGRAFI**

- Abidin, H. H. (2023). *Pancasila*. CV. Azka Pustaka.
- Amrullah, M., Nur Kamila, P., Khalid, I. A., Budiono, I., Damanik, S. H. P., Timoera, D. A., SH, M. H., & others. (2024). *Pendidikan Pancasila*. CV Rey Media Grafika.
- Arfa'i, S. H. (2023). *Aktualisasi Pancasila sebagai sumber hukum dalam tahapan pembentukan undang-undang*. PT. Salim Media Indonesia.
- Baliano, P., Wismanjaya, H., & Haryanti, A. (2020). *Pilsafat Pancasila*. Unpampress.
- Effendi, Y. R. (2023). *Sebuah kajian filosofis: Pendidikan karakter berbasis nilai serta juga norma Pancasila*. *Journal of Humanities and Civic Education*, 1(1), 29–45.
- Hadita, C. (2021). *Pancasila: Perspektif ketatanegaraan serta juga paradigma ajaran Islam*. Penerbit EnamMedia.
- Harefa, A., & Daliwu, S. (2020). *Teori pendidikan Pancasila yang terintegrasi pendidikan anti korupsi*. Penerbit Lutfi Gilang.
- Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). *Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan hukum di Indonesia*. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum serta juga Politik*, 2(2), 138–150.
- Hutabarat, S. A. (2023). *Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara untuk mewujudkan kepastian hukum serta juga keadilan hukum dalam putusan hakim ditinjau dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia*. Universitas Kristen Indonesia.
- Ibnu Masud, S. H. (2024). *Pancasila*. Penerbit Berseri.
- Iswardhana, M. R. (2020). *Pendidikan Pancasila serta juga kewarganegaraan: Merajut kebinekaan dalam menghadapi tantangan revolusi industri*. PT Kanisius.
- Majid, N. K. (2024). *Pancasila sebagai landasan etika politik: Tantangan serta juga peluang di era globalisasi*. *Action Research Literate*, 8(3), 509–516.
- Megawati, L., Mulyadi, D., Suhariyanto, D., Hardiyanti, D. P., Pongpalilu, F., Sabaruddin, S., & others. (2024). *Buku ajar Pancasila serta juga kewarganegaraan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Muttmainnah, R., Siregar, P., & Trisno, B. (2024). *Pancasila sebagai sistem filsafat*. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan serta juga Filsafat*, 2(3), 63–75.
- Napitu, U., Nasution, T., Saragih, R., & Purba, D. T. (2022). *Sosialisasi penguatan ideologi Pancasila bagi peserta didik SMIP Universitas Simalungun*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 2(2), 62–83.
- Prasetyo, A. D. (2022). *Buku ajar pembelajaran PPKn MI*. Guepedia.
- Putra, I., Bakry, K., Ahmad, A., Lathif, N., Mihradi, R. M., & Efitra, E. (2024). *Hukum tata negara: Teori komprehensif serta juga studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Rahayu, A. S., & M. A. P. (2024). Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) (Edisi Kedua). Bumi Aksara.
- Rizkianto, A. (2022). Falsafah Pancasila sebagai basis pengembangan dakwah Islam. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila serta juga Kewarganegaraan)*, 3(2), 69–94.
- Subawa, M., & Hermanto, S. H. (2023). Aktualisasi filsafat ilmu hukum Pancasila dalam penguatan serta juga pembenahan pembentukan undang-undang di Indonesia. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Sudirta, I. W. (2023). Rekonstruksi pemahaman atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa serta juga bernegara. Universitas Kristen Indonesia.
- Tusriyanto, T. (2024). Pendidikan Pancasila. CV. AMY Publishing.
- Umarhadi, Y. (2022). Hakikat manusia Pancasila menurut Notonagoro serta juga Drijarkara: Aktualisasinya bagi demokrasi Indonesia. PT Kanisius.
- Utami, E., Saputra, A. A., Siti, I., & Suryani, R. (2022). Pendidikan Pancasila. Tangerang Selatan: Unpam Pres.
- Wirawan, V. (2022). Pancasila sebagai sumber tertib hukum tertinggi (suatu kajian filsafat): Pemahaman bagi mahasiswa UNJAYA, UNIMUGO serta juga UMK. *Abdi Masyarakat*, 4(1).